

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang sistematis dan menyeluruh dalam penanggulangan kemiskinan. Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai objek melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan.

Dalam organisasi terdapat suatu bagian untuk memaksimalkan sistem intern yang ada diorganisasi yaitu untuk mengawasi dan meminimalkan penyimpangan yang mungkin terjadi dan untuk melakukan audit yang disebut *internal auditor*. Staf audit berada diluar fungsi manajemen lini dari kesatuan

yang sedang mereka audit dalam struktur organisasi. Agar dapat melakukan tugasnya secara efektif, *internal auditor* harus independen terhadap fungsi-fungsi lini dalam organisasi tempat ia bekerja, namun demikian ia tidak bisa independen terhadap organisasinya karena ia adalah bagian dari organisasi yang diaudit. Pihak luar organisasi pada umumnya tidak dapat mengandalkan hasil audit yang dilakukan oleh *internal auditor* karena kedudukannya yang tidak independen. Kedudukan yang tidak independen inilah yang membedakan *internal auditor* dengan *eksternal auditor* dari kantor-kantor akuntan publik.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh *internal auditor* diantaranya adalah pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kepatuhan, dan pemeriksaan kinerja. Fungsi *internal audit* adalah sebagai teknik pengendalian internal yang konvensional. *Internal auditor* pada umumnya dipimpin seorang akuntan. Dengan demikian hampir semua perusahaan besar menetapkan fungsi *internal audit* untuk melihat sejauh mana masing-masing bagian dalam perusahaan menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan uraian tugas masing-masing. *Internal auditor* berkewajiban memberi informasi kepada manajemen yang berguna untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan efektifitas organisasi.

Salah satu lingkup pemeriksaan yang dilakukan oleh *internal auditor* adalah pemeriksaan aset tetap. Aset tetap merupakan aset yang bernilai relative besar dalam organisasi, oleh karena itu manajemen perlu melakukan suatu perencanaan dan pengawasan agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menimbulkan salah penilaian material dalam laporan keuangan. Aset tetap

dibutuhkan oleh organisasi untuk menunjang kegiatan operasionalnya. Maka dari itu, organisasi yang berinvestasi terhadap aset tetap memiliki tujuan agar aset tersebut dapat mendukung kegiatan organisasi sehingga dapat mendatangkan pendapatan dimasa kini dan dimasa depan bagi organisasi.

Mengingat besarnya dana yang diinvestasikan dalam aset tetap maka perlu diadakan pengawasan baik dalam bidang administrasi maupun bidang akuntansi oleh *internal auditor*. Fungsi lain yang dilakukan bagian *internal auditor* adalah melaksanakan penilaian terhadap sistem pengendalian intern yang diciptakan untuk menjamin bahwa data keuangan dapat dipercaya dan apakah harta organisasi telah diawasi dengan baik.

PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Perdesaan merupakan salah satu upaya pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan model pembangunan yang menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat. UPK (Unit Pengelola Kegiatan) merupakan unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan dan membantu BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) mengoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan. Pengurus UPK terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Pengurus UPK berasal dari anggota masyarakat yang diajukan dan dipilih berdasarkan hasil musyawarah desa.

PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Bungatan berdiri sejak 20 Maret 2010, yang terdiri dari 7 desa yaitu Pasir Putih, Bungatan, Selowogo, Bletok, Sumber Tengah, Patemon dan Mlandingan Wetan dengan alokasi dana BLM

(Bantuan Langsung Masyarakat) sebesar Rp 3.000.000.000,- untuk biaya pembangunan dan simpan pinjam perempuan di desa. Dana Dok Perencanaan sebesar Rp 69.800.000,- dan dana Dok Pelatihan sebesar Rp 18.665.000,-. Dana tersebut dikelola secara mandiri oleh masyarakat melalui UPK Kecamatan Bungatan.

Dalam menjalankan aktivitasnya PNPM Mandiri Perdesaan juga memiliki *internal auditor* yang disebut BP UPK (Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan). Masalah yang ada diorganisasi adalah *internal auditor* yaitu BP UPK belum pernah melakukan pemeriksaan fisik aset tetap secara periodik. Dalam hal ini BP UPK hanya memeriksa laporan keuangan beserta bukti-bukti yang ada seperti nota-nota dan kwitansi-kwitansi pembelian tunai yang dilakukan rutin setiap bulan.

Melihat begitu pentingnya pemeriksaan internal aset tetap bagi organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sehingga memerlukan perhatian khusus maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Fungsi Dan Tanggungjawab *Internal Auditor* Dalam Pemeriksaan Aset Tetap (Studi

Kasus Pada PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo)

B. Permasalahan

BP UPK (Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan) pada PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Bungatan tidak pernah melakukan pemeriksaan aset tetap secara periodik. BP UPK pada PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan

Bungatan lebih fokus pada pemeriksaan pengelolaan kas yang dilakukan oleh UPK setiap bulan tanpa memperhatikan laporan aset tetap secara rinci. Padahal aset tetap dalam organisasi sangat penting, karena berpengaruh pada laporan keuangan yang disajikan pada suatu organisasi tertentu. Seperti akumulasi penyusutan berpengaruh terhadap nilai buku yang disajikan dalam neraca dan beban penyusutan terhadap laporan penyusunan laporan rugi laba dan keberadaan aset tetap di suatu organisasi benar-benar milik organisasi dan bukan pinjam atau *list*.

PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Bungatan melakukan penyusutan aset tetap tanpa memperhatikan tanggal perolehan dan juga tidak ada total pengeluaran yang terjadi untuk memperoleh aset tetap tersebut. Perhitungan aset tetap pada PNPM Mandiri Kecamatan Bungatan yaitu dengan cara harga perolehan dibagi dengan umur ekonomis. Hal ini dapat dilihat dari daftar aset tetap yang ada di PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Bungatan. Pada daftar aset tetap juga tidak ada nilai residu yaitu taksiran harga jual aset tetap pada akhir masa manfaatnya apabila aset tetap tersebut dijual setelah diberhentikan masa pemakaiannya. Seharusnya, perhitungan aset tetap yaitu harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi umur ekonomis. Permasalahan lain yang ada pada daftar aset tetap yaitu seperangkat komputer yang pembeliannya pada tanggal 16 Oktober 2010 tetap mengalami penyusutan sedangkan, umur manfaat hanya 36 bulan. Masa manfaat seperangkat komputer tersebut seharusnya sudah habis dan tidak ada lagi penyusutan atau dilakukan penghapusan aset tetap. Hal ini merupakan penyajian aset tetap secara tidak wajar. Apabila aset tetap dan

penyusutan disajikan dalam laporan keuangan secara tidak wajar maka akan memberikan informasi yang menyesatkan bagi laporan keuangan tersebut, untuk mengecek kebenarannya informasi laporan keuangan perlu dilakukan pemeriksaan akuntansi dan juga bentuk fisiknya. Dengan adanya permasalahan yang ada bahwa pengawasan aset tetap yang ada di PNPM Kecamatan Bungatan lemah. BP UPK juga tidak mengetahui bagaimana pelaporan aset tetap yang ada dan berapa besar aset tetap yang dimiliki UPK Kecamatan Bungatan. Sehingga menimbulkan pelaporan aset tetap pada laporan keuangan UPK yang tidak wajar.

C. Rumusan Masalah

Untuk menghadapi permasalahan yang telah diuraikan dalam permasalahan di atas, maka perumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimanakan prosedur pemeriksaan aset tetap pada PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Bungatan?
2. Apakah fungsi dan tanggung jawab BP UPK (Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan) pada PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Bungatan sudah efektif khususnya pada pemeriksaan aset tetap?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pemeriksaan aset tetap yang dilakukan oleh BP UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Bungatan.

2. Untuk mengevaluasi fungsi dan tanggung jawab BP UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Bungatan.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Penelitian bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang fungsi dan tanggung jawab *internal auditor* dalam pemeriksaan aset tetap pada PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Bungatan.

2. Kegunaan Penelitian bagi Tempat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rekomendasi perusahaan untuk memperbaiki dan menyempurnakan fungsi dan tanggung jawab *internal auditor* dalam pemeriksaan aset tetap.

3. Kegunaan Penelitian bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan sebagai referensi dalam hal analisis fungsi dan tanggung jawab *internal auditor* dalam pemeriksaan aset tetap.